

BAB II

TINJAUAN PUTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu berikut ini diharapkan peneliti dapat memilah perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan mengkomper penelitian yang telah dilakukan berdasarkan perspektif konsentrasi penelitian. Diantaranya Pertama penelitian dilaksanakan oleh saudara Ridwan Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul *“Sail Komodo” Bentuk Pengendalian Negara Terhadap Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Komodo* (Studi Pada Masyarakat Di Pulau Komodo, Desa Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat). Arah penelitian yang dilakukan diatas mengarah pada konsentrasi pendekatan masyarakat. Masyarakat yang menjadi tinjauan penelitian mengkaji dampak sail komodo sebagai kebijakan Pemerintah dalam pengembangan pariwisata pada kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Penelitian ini berkonsentrasi terhadap analisa sosiologi karena pembahasannya murni membahas persoalan yang terjadi pada masyarakat paska dilaksanakannya agenda sail Komodo.

Penelitian Kedua dilaksanakan oleh saudari Putri Sinta Sari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul *Pengelolaan Pariwisata Daerah Taman Nasional Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Prov. NTT*. Penelitian ini mengkaji terkait manajemen pariwisata di kawasan TNK, bagaimana proses dan strategis pengembangan pariwisatanya. Sasaran penelitian ini pada Dinas Pariwisata Labuan Bajo dan fokus analisis penelitian ini membahas soal

administrasi Pemerintahannya sesuai dengan besik disiplin ilmunya Administrasi Negara. Ketiga oleh Rafael Modestus Ziku Universitas Udayana dengan judul Partisipasi Masyarakat Desa Komodo Dalam Pengembangan Ekowisata Di Pulau Komodo. Dalam penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang pertama dimana arah penelitiannya tinjauannya masyarakat di Pulau Komodo itu sendiri. Konsentrasi penelitian pada keterlibatan atau kontributif masyarakat di Pulau Komodo dalam aktifitas pariwisata. Menganalisa sejauh mana kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses dan pengembangan pariwisata di TNK. Dari ketinjauan penelitian terdahulu diatas dapat peneliti mengkomper perbedaan dengan yang akan diteliti dalam table berikut ini (Lihat Tabel 2.1)¹.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Sasaran Penelitian	Pembahasan
1	Ridwan	“ <i>Sail Komodo</i> ” Bentuk Pengendalian Negara Terhadap Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Komodo (Studi Pada Masyarakat Di Pulau Komodo, Desa Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat)	Masyarakat	Dampak implementasi kebijakan Pemerintah melaksanakan Sail Komodo terhadap masyarakat didalam kawasan TNK. Dengan penyelenggaraan Sail Komodo merupakan wujud konkrit Pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan TNK yang dijadikan sebagai konservasi Komodo. Dengan diselenggaranya agenda Sail Komodo ini sebagai upaya Pemerintah dalam hal promosi menaikan <i>bergaining position</i> dikancah nasional dan internasional sebagai destinasi pariwisata yang strategis. Sehingga akan dapat memberikan dampak positif terhadap Negara diaspek pendapatan serta dengan adanya pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat tekhusus Pulau Komodo yang secara administrasi masuk dalam kawasan TNK. Masyarakat akan dapat peluang peningkatan pendapatan dari hasil terlibat dalam pelaku wisata. Berdasarkan penelitian

¹ Di olah oleh Peneliti

				ini menghasilkan analisis dampak positif adanya sail komodo memberikan efek positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di Pulau Komodo.
2	Putri Sinta Sari	Pengelolaan Pariwisata Daerah Taman Nasional Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Prov. NTT	Dinas Pariwisata	Pengelolaan dan Pengembangan kawasan Pariwisata yang ada didalam kawasan TNK. Keterlibatan lembaga Pemerintah Daerah Manggarai Barat dalam berkontribusi pada aspek pengembangan dan pengembangan destinasi pariwisata yang terdapat pada kawasan TNK. Selain itu korelasi antar Balai TNK dan Dinas Pariwisata Labuan Bajo dalam pelaksanaan program konservasi dan pariwisata. Dari analisis penelitian ini bahwa masih sangat minimnya kontribusi Pemda dalam aspek pembangunan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat didalam kawasan yang masih kurang. Dikarenakan ruang lingkup kewenangan antar lembaga ini menjadi kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan konektifitas dan pembagian porsi kewenangan yang jelas maka terealisasinya program kerja antar Balai dan Pemerintah Daerah dengan baik.
3	Rafael Modestus Ziku	Partisipasi Masyarakat Desa Komodo Dalam Pengembangan Ekowisata Di Pulau Komodo	Masyarakat	Peran aktif masyarakat terhadap pengembangan pariwisata berbasis ekowisata didalam kawasan TNK. TNK merupakan kawasan konservasi fauna endemik Indonesia yakni Komodo. Dimana pada kawasan ini tidak hanya murni kawasan konservasi Komodo tetapi juga sebagai Cagar Manusia. terdapat ribuan masyarakat yang berdomisili didalam kawasan sehingga menjadi tugas besar Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat agar dapat bersama-sama dalam menjaga dan mengelola kawasan TNK. Partisipatif masyarakat salah satu aspek ketercapaian agenda Balai TNK dan Dispar. Sehingga masyarakat harus dapat berkontribusi aktif dalam segala macam agenda yang dijalankan Balai dan Dispar. Hasilnya masyarakat banyak yang terlibat dalam pelaku usaha pada sektor pariwisata. Selain itu Balai dan Dispar juga mewadahi masyarakat dalam Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibentuknya di antaranya LSM Mansa bergerak pada bidang lingkungan atau Sampah, Kompas pada bidang <i>Guide</i> pemandu wisata. Dengan keterlibatan masyarakat dalam

				kawasan TNK sangat membantu kinerja Pemerintah dalam pengelolaan kawasan TNK itu sendiri. Sehingga pelaksanaan program kerja Balai TNK dalam aspek konservasi akan berjalan dengan Baik efektif dan efisien.
--	--	--	--	--

Dapat peneliti menarik kesimpulan penelitian diatas dengan perbedaan orientasi yang akan dilaksanakan peneliti yaitu pada sasaran penelitiannya. Penelitian terdahulu sasaran penelitiannya adalah Masyarakat dan Dinas Pariwisata, sedangkan yang akan di teliti oleh peneliti adalah Institusi Balai TNK itu sendiri. Arah penelitian ini mengkaji terkait Kinerja Balai TNK dalam proses tatakelola kawasan TNK yang menjadi kawasan Konservasi serta pemanfaatan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Selain itu melihat bagaimana konektifitas pengelolaan TNK yang unik dengan bercirikan kepulauan. Jadi fokus penelitian ini mengkaji kinerja Balai TNK dari perspektif Pemerintahannya yang berkaitan dengan konektifitas tatakelola kawasan Konservasi yang ditetapkan sebagai KSPN.

2.2 Tinjauan Konektifitas

Konektifitas antar lembaga Pemerintahan yang terkait merupakan strategi manajemen dalam pengelolaan TNK. Balai TNK memiliki hubungan hirarki lembaga organisasi diatasnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan konservasi. Diantaranya melaksanakan program kerja strategis yang sudah di tetapkan dan direncanakan oleh lembaga Pemerintah Pusat yang menanggunginya yaitu Dirtjen KSDAE dan Kementrian LHK. Sebab secara kewenangan Balai TNK sebagai Unit Pelaksana Teknis maksudnya penyelenggara pengelolaan di lapangan. Sehingga secara gagasan atau konsep pengelolaannya

dirancang oleh Pemerintah Pusat dan di tingkatan Daerah yang mengeksekusi rancangan tersebut melalui program kerja. Sebab itu konektifitas antar lembaga diatas harus bersinergi agar penjalanan kinerjanya tersentralisir dengan baik. Baik dalam aspek kontroling dari KLHK melalui Ditjen KSDAE terhadap penjalanan program kerja yang di berikan kepada Balai TNK maupun program strategis dari Dirtjen KSDAE kepada Balai TNK.

Konektifitas pada internal Lembaga Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan TNK. Diantaranya mencakup lembaga KLHK pada tingkatan Pusat melalui Dirtjen KSDAE dengan UPT di wilayah Daerah yakni Balai TNK. Kemudian secara pengontrol lembaga kementerian di wilayah Daerah dalam penjalanan kinerja kelembagaan dilaksanakan oleh Inspektorat. Selain itu konektifitas juga dibangun dalam aspek pelaksanaan Program kerja strategis yang dijalankan Balai TNK atas Konsepan Dirtjen KSDAE. Sehingga dalam proses teknis dilapangan mengharuskan keterlibatan lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan program tersebut. Sebab secara kapasitas dan kapabilitas tidak mungkin dijalankan hanya oleh *singel* institusi tetapi membutuhkan mitra kerja lainnya sebagai patner kerja agar hasilnya akan efektif dan efesien. Oleh karena itu Balai TNK menjalin mitra kerjsama dengan Pemerintah Daerah meliputi Polres, Dispar, Dishub, Non Pemerintahan lainnya BUMN, serta Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Konektifitas antar lembaga yang terlibat secara teknis dikawasan TNK dalam penjalanan program kerja inilah yang menjadikan proses pengelolaan TNK berjalan secara maksimal. Sehingga harus terjalin koordinatif maupun instruktif semua lembaga yang terlibat tersebut. Seluruh lembaga yang terlibat akan

berkontribusi terhadap kinerja Balai tekhusus pada aspek Konservasi dan Pariwisata. Selain itu kewenangan dari setiap lembaga terlibat tersebut berdasarkan spesifikasi wilayah kerjanya. Baik pada aspek Pengawetan atau perlindungan dan penelitian soal satwa Komodo, pengamanan kawasan, serta pembangunan infrstruktur yang mendukung jalannya pengelolaan konservasi serta pembangunan infrastruktur pariwisata didalam kawasan TNK.

Persoalan dasar agar kebijakan program dalam pelaksanaannya terealisasi berdasarkan konsep perencanaan adalah Konektifitas antar lembaga terkait yang menjalankan tanggung jawab tersebut.² Aspek pola komunikasi merupakan kunci dalam menghubungkan konektifitas antar lembaga tersebut. Agar seluruh elemen yang terlibat dalam proses pengelolaan TNK berjalan sesuai dengan perencanaan. Maka semua elemen yang terlibat harus terkoneksi secara massif pada aspek pola komunikasi. Baik pola komunikasi penjalanan program kerja yang bersifat instruksi maupun koordinatif. Dapat ditarik pola komunikasi yang akan terbangun diantaranya pola komunikasi sentralistik atau intruktif dari KLHK kepada KSDAE terhadap UPT Balai TNK itu sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan program kerja dilapangan Balai menjalin komunikasi bersama lembaga yang menjadi mitra kerjanya sehingga mengharus untuk Balai TNK melakukan komunikasi bersama mitra kerjanya agar terkoneksi.

2.3 Tinjauan Tatakelola Pemerintahan

Tatakelola Pemerintahan merupakan proses manajemen yang dijalankan berdasarkan pada penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan baik. Pengelolaan

² Joko Widodo. 2013 , *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm 97

dijalankan oleh pihak Balai TNK dengan sistem zonasi dan menjunjung tinggi prinsip dasar sebagai fungsi Pengawetan, Perlindungan, Pemanfaatan.³ Penjalanan proses pengelolaan ini dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada baik dari sumberdaya manusia dari Pegawai maupun sumberdaya alam Fauna Komodo dan Destinasi wisata laut. Pada dasarnya segala aktifitas pengelolaan yang dijalankan harus mampu memberikan dampak ekonomi, sosial, maupun politik dalam rangka kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan tatakelola Pemerintahan tentunya yang menjadi subjek atau pelaku penyelenggara adalah Balai TNK sebagai perwakilan lembaga Pemerintah Pusat di wilayah Daerah berdasarkan dasar hukum organisasi dan ruang lingkup kerjanya. Sehingga Balai TNK memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kepemimpinan dalam penyelenggaraan tatakelola Pemerintahan itu sendiri.

“Menurut E. Koswara (2010:270) dalam Jopinus Saragih, menjelaskan bahwasannya jiwa kepemimpinan Pemerintahan merupakan sebuah amanah, berakhlak, dan bertanggung jawab”. Balai TNK dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan harus memiliki jiwa kepemimpinan. Dimana harus menjalankan tugas secara profesional berdasarkan SOP penjalanan tugas dalam penjaga sudah ditetapkan. an kawasan, perlindungan satwa Komodo dan sumber makananya dari perburuan liar, pelayan pariwisata sehingga terselenggaranya manajemen pengelolaan Pemerintahan yang profesional. Atas dasar jiwa

³ Pengawetan maksunya Balai TNK menjaga kestabilan ekosistem flora dan fauna yang ada dalam kawasan terkhusus Komodo beserta mata rantai makanannya. Perlindungan Pengamanan kawasan dilakukan petugas Balai terhadap aktivitas yang merusak lingkungan dan ekosistem diantaranya perburuan liar satwa, kebakaran hutan. Pemanfaatan yakni pendayagunaan potensi yang ada dalam kawasan dengan tidak merubah ataupun merusak ekisistem agar bisa bermanfaat bagi masyarakat berupa penelitian, pendidikan, pariwisata, dan bina cinta alam.

kepemimpinan dimiliki pegawai Balai maka maka berbagai macam kendala akan dapat termanajemen dengan baik.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam mengukur ketercapaian hasil kinerja dari pada pengimplementasian program kerja Pemerintah. Salah satu aspek yang penting adalah bagaimana monitoring dan kontroling atas kebijakan tersebut. Kontroling dimaksud sebagai usaha atau proses pengamatan dan analisis terhadap program kerja yang dijalankan apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah di konsep. “Strategi pelaksanaan pengontrolan dan monitoring terhadap pelaksanaan daripada kebijakan tersebut mencakup penentuan Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan, Standar operasional kebijakan, Sumberdaya keuangan dan Peralatan”.⁴ Suatu keharusan bahwasannya dalam tahapan monitoring dan kontroling atas kebijakan yang ditetapkan Pemerintah untuk mengukur target dari perencanaan kebijakan tersebut.

Pelaku pengontrol kebijakan dalam tahap monitoring dan kontroling dimaksud merupakan lembaga Pemerintah Pusat. Lembaga yang memiliki konsentrasi pada sektor Konservasi merupakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK membawahi lembaga Dirtjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Dari kedua lembaga diatas melakukan kontroling dan monitoring terhadap Unit Pelaksana Teknisnya yaitu Balai Taman Nasional Komodo. Dalam penjalanan program kerja Balai selaku lembaga eksekusi atas kebijakan rancangan program kerja strategis oleh KLHK dan KSDAE berjalan sesuai dengan standar operasional kerja. *Standard*

⁴ Op.cid Hlm 94

Operating Prosesure (SOP) menjadi panduan Balai dalam menjalankan tugas pengelolaan kawasan konservasi dan pariwisata pada TNK.

Untuk mendukung jalannya proses pengimplementasian kebijakan program kerja strategis konservasi dan pariwisata diatas, hal yang perlu diperhatikan merupakan keuangan dan peralatan.⁵ Sehingga pendanaan jalannya program kerja yang akan dilaksanakan oleh Balai TNK, bersumber pada APBN karena Taman Nasional berhubungan langsung dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Serta peralatan berupa infrastruktur pendukung jalannya pengelolaan TNK menjadi alat untuk pegawai Balai TNK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian waktu dalam pelaksanaan pengontrolan pelaksanaan program kerja Balai dilakukan satu tahun sekali oleh Dirlan KSDAE dan Lembaga Inspektorat.

2.3.1 Good Governance

Good Governance merupakan sebuah gagasan konsep yang tepat dalam hal menjawab persoalan ketimpangan yang terjadi pada praktek Birokrasi Pemerintahan kita dewasa ini. Dengan dipraktekkannya spirit ini dalam penjalanan tugas dan fungsi Balai TNK maka akan terselenggaranya pengelolaan kawasan TNK yang akuntabel, transparasi, amanah, dan profesional. Praktek tersebut dengan memberikan mutu pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pemberdayaan, penegakan hukum terhadap tindakan yang merusak kawasan, administrasi pemerintahan yang tidak rumit, melibatkan seluruh elemen swasta dalam pelaku pariwisata, menggandeng mitra kerja lembaga pemerintah terkait..

⁵ Op.cit Hlm 95

Menurut Cagin di jelaskan: “Konsep *governance* merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan di selenggarakan, keputusan dibuat, suara rakyat di dengar”.⁶ Dengan adanya Taman Nasional Komodo yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga Balai TNK sehingga pada hakikatnya mengharuskan agar adanya TNK akan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Segala macam kebijakan sampai saat ini di lakukan oleh Balai TNK sendiri senantiasa atas dasar kepentingan dan kebaikan bagi masyarakat dalam kawasan itu sendiri. Salah satu kebijakan berupa pelarangan pengrusakan ekosistem alam dalam kawasan dan manfaatnya pun hari ini masyarakat nikmati dengan terjaganya kelestarian alam. Sehingga terjaganya kelangsungan hidup Komodo dan Alam yang terjaga berdampak pada pemanfaatan potensi tersebut oleh Pemerintah dan Masyarakat dan memberikan dampak ekonomi.

Good governance merupakan prinsip kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai nilai dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *good governance* juga sebagai wujud nyata penyelenggaraan Pemerintah yang bersih ataupun proses tatakelola Pemerintahan yang baik dan benar. Dalam keberlangsungan penyelenggaraan *good governance* tersebut, tidak lepas pula soal sumberdaya manusia pegawai Balai maupun Masyarakat yang menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan oleh Balai TNK. Sehingga dengan kapabilitas pegawai Balai TNK pada aspek kuantitas jumlah dan kapabilitas pendidikan akan menciptakan kondisi pengelolaan Balai yang baik dalam wujud akuntabilitas dengan pertanggung jawaban tahunan kinerja Balai, keterlibatan penelitian, magang oleh organisasi, sekolah maupun universitas, dan

⁶ Syakrani, Syahiani. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif *Good Governance*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009. Hlm 121

kemitraan yang dijalankan Balai bersama lembaga kementerian terkait, Swasta, Bumh, dan Pemerintah Daerah.

“Sementara itu *god governance* seringkali di pahami sebagai penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. sehingga arah praktek dari pada *good governance* sendiri merujuk kepada tindakan dan prilaku pejabat public tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengambil keputusan dan menetapkan kebijakan dalam sebuah Negara”.⁷ Analogi dari makna kata *governance* dapat diartikan sebagai penggunaan atau pelaksanaan, yang cerminan penjalanan tugas di lapangan dilaksanakan petugas Balai menjadi dasar hukum. Sehingga dalam menjalankan tugas dilapangan pegawai Balai harus mengacu pada standar operasional kerja yang telah ditetapkan oleh Balai TNK.

Menurut Kushandajani “upaya yang dilakukan dalam membangun *good governance* di Daerah ada beberapa prinsip dasar yang harus di praktekkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yaitu: Prinsip kepastian hukum, transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan partisipasi.”⁸ Pengimplementasian *good governance* mencakup tiga unsur utama yang harus terlibat dan saling berketerhubungan yaitu: Negara (*state*), Sektor Swasta (*private sector*), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (*civil society organization*). Dalam hal ini dimana negara melalui lembaga Pemerintahannya mencitakan lingkungan politik, hukum yang kondusif, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. sektor swasta menciptakan atau memfasilitasi lapangan pekerjaan, penghasilan. Serta lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam aktifitas atau interaksi sosial, ekonomi,

⁷ Ibid. Hlm. 183

⁸ Teguh Yuwono. Manajemen Otonomi Daerah Membangun Daerah Berdasarkan Paradikma Baru. Semarang. Clogapps. Diponegoro University. 2001.Hlm. 71

budaya, dan politik.⁹ Dari ketiga dasar unsur diatas agar terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* tersebut maka lembaga masyarakat, swasta, dan pemerintah senantiasa sejalan dan harus saling mensupport agar berkontribusi terhadap jalannya tatakelola pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia yang Baik dan Bersih.

Konsep *Good Governance* terdapat sembilan unsur utama, yang dijadikan prinsip dalam praktek pelaksanaan proses tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih tersebut. Konsep tersebut dijelaskan UNDP dalam (Muh.Arief Efendi) terkait sembilan unsur *good governance* diantaranya adalah Partisipasi (*Participation*), Penegakan Hukum (*Rule Of Law*), Transparansi (*Transparency*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Berorientasi Pada Konsensus (*Consensus Orientation*), Keadilan (*Equity*), Efisien dan Efektifitas (*Efficiency dan Effectiveness*), Akuntabilitas (*Accountability*), Visi Strategis (*Strategic Vision*).¹⁰ Gagasan konsep teoritik diatas pada hakikatnya sebagai padoman dasar dalam praktek penyelenggaraan tatakelola Pemerintahan pada linih instansi dan lembaga Pemerintah. Terkhusus pada Balai TNK penerapan prinsip tatakelola Pemerintahan ini dijadikan acuan dalam setiap penyelenggaraan kebijakan. Dari kesembilan unsur diatas korelasi yang berhubungan dengan tatakelola TNK sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

⁹ Hari Sabrano. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta. Sinar Grafik. 2007. Hlm 17

¹⁰ Muh.Alif effendi. The Power Good Corporate Governance. Jakarta. Salemba Empat. 2016. Hlm.11

Pada aspek ini Dalam pelaksanaan program kerja Balai TNK juga melakukan pemberdayaan masyarakat yang berdomisili di dalam kawasan TNK. Dalam pelaksanaan pemberdayaan berupa sosialisasi berupa seminar edukasi akan pentingnya pelestarian lingkungan dengan melibatkan warga agar turut terlibat dalam menjaga kawasan TNK. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan Balai TNK mencakup pelatihan skill kepada warga yang diwadahi dalam wujud organisasi berupa pelatihan guide dan pembuatan sofenir sebagai bekal dalam keterlibatan warga dalam partisipasi pada pariwisata di kawasan TNK. Selain itu aspek partisipasi juga dalam proses pengelolaan kawasan, Balai juga melibatkan stakeholder lain sebagai mitra kerja untuk menjadi *suporting sistem* diantaranya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata, Polres Manggarai Barat, Dinas Perhubungan, BUMN Telkom dan PLN, Swasta WWF, DOC, dan LSM Mansa, Kompas.

2. Penegakan Hukum (*Rule Of Law*)

Pada aspek ini dimana petugas Balai TNK sangat menjunjung tinggi aturan konservasi. Dimana petugas sangat menindas tegas pelanggaran berupa pencurian satwa dalam kawasan serta mengambil apapun dalam kawasan. Penegakan hukum dilakukan dengan metode patroli rutin bersama aparat kepolisian daerah maupun internal Balai TNK menyusuri kawasan. Hal yang sangat fulgar di lakukan sperti yang dikatakan Kepala Polhut TNK untuk tidak segan-segan menembak para pelaku pencuri Rusa dan Komodo apabila kedapatan dikawasan.

3. Transparansi (*Transparancy*)

Pada aspek ini Balai TNK memperbolehkan pihak lain untuk mengakses data hasil kinerja. Cakupan transparansi merujuk pada prinsip untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan agar menjadi rujukan perbaikan penjalanan kinerja balai kedepannya. Data-data berupa alokasi pendanaan, realisasi program kerja, dan evaluasi kinerja. Selain itu data kinerja Balai TNK setiap akhir tahunnya akan di publikasi melalui webside resminya atau dapat diakses pada lembaga Kementrian terkait yang menaunginya.

4. Efisien dan Efektifitas (*Effeciency dan Effectiveness*)

Pada aspek ini dimana Balai TNK dalam manajemen pengelolaan kawasan yang berciri kepulauan melakukan pembagian kerja yang rill. Kawasan TNK dibagi menjadi tiga seksi wilayah dan didalam seksi tersebut terbagi lagi menjadi sebelas resort. Strategi pembagian kerja diatas dilakukan Balai TNK untuk memanajemen waktu agar efiesensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja. Efiesensi waktu dengan penyediaan fasilitas sarana komunikasi dan kelancaran transportasi dan efektifitas program dengan melibatkan stakeholder lain dalam suksesi program kerja tersebut.

5. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada aspek ini Balai TNK merupakan keterwakilan lembaga pemerintah Pusat dalam penyelenggara tatakelola TNK di wilayah daerah. Sehingga prosedural pertanggung jawaban dilakukan Balai TNK kepada lembaga diatasnya. Yakni Dirtjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) kemudian kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Wujud

pertanggung jawaban Balai TNK dengan lembaga diatas berupa Perjanjian Kerja pertahunnya.

6. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pada aspek ini visi utama Balai TNK adalah Bagaimana TNK tetap terjaga ekosistemnya. Terkhusus pada tugas utama Balai TNK dalam menjamin keberlangsungan hidup satwa Komodo dengan rantai makanannya. Selain itu Balai TNK juga harus memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat dikawasan maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Dampak tersebut terwadahi pada aspek zona pemanfaatan dimana hal ini mencakup pengelolaan kawasan dijadikan sebagai kawasan pariwisata dan pemukiman warga. Pada aspek program kerja Balai sendiri merujuk pada konsep program kerja strategis tahun 2015-2019 yang telah di konsep oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian KLHK dan Dirtjen KSDAE. Sehingga Balai TNK hanya mengeksekusi program strategis yang diamanahi Pemerintah Pusat tersebut.

2.3.2 Asas Asas Good Governance

Prinsip *good governance* pada hakikatnya mengandung nilai yang sifatnya masih sangat umum, objektif, dan ilmiah. Dasar prinsipil tersebut menjadi landasan parameter menentukan fariabel penyelenggaraan pemeintahan yang baik dan bersih.¹¹ Prinsip *good governance* secara praktek penyelenggraan tatakelola pemerintahan tersebut tertuang dalam landasan normative pada Pada Pasal 33 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Pemerintahan yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Berikut ini tujuh asas umum

¹¹ Utang Rosdin. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung. Pustaka Setia. 2010. Hlm. 183

prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarakan Undang undang diatas yaitu: Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggara negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas akuntabilitas.

Asas kepastian Hukum yang dimana masyarakat yang hidup pada kawasan konservasi TNK memiliki kepastian hukum dalam artian negara melindungi secara keberadaan mereka. Aspek dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi TNK dibawah naungan Kementrian KLHK melalui Unit pelaksana teknis yakni Balai TNK. Pelaksanaan program kerja dilakukan Balai TNK bersama stakeholder terkait. Aspek kepentingan umum menjadi dasar prioritas pengelolaan TNK agar dapat kepentingan semua lembaga yang terlibat baik itu Pemerintah maupun Non Pemerintah. Aspek keterbukaan dimana segala informasi terkait TNK dapat diakses oleh publik. Aspek proporsionalitas dan profesionalitas dimana lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TNK memiliki porsi kewenangan masing-masing berdasarkan tupoksinya. Dalam penyelenggaraan pengelolaan Pemerintah menjunjung tinggi standar operasional kerja dalam menjalankan tugas di lapangan. Kemudian aspek akuntabilitas dimana dalam penjalanan program kerja Balai TNK akan mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya kepada lembaga yang menaunginya yakni kepada Dirjen KSDAE serta Kementrian LHK.

Prinsipil asas diatas sebagai wujud konkrit penyelenggaraan tatakelola Pemerintahan tersebut haru mengacu pada asas yang dijelaskan seperti diatas. Asas tersebut tidak hanya sebagai teoritik dan selogan birokrasi saja akan tetapi harus dapat di pahami dan di praktekan secara riil dalam konteks penyelenggaraan

tatakelola TNK. Agar asas-asas *good governance* ini menjadi acuan bagi pegawai atau penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berupa pelayanan, keamanan, pembangunan terhadap masyarakat. Sehingga terciptanya tatakelola pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* itu sendiri dan terealisasinya reformasi birokrasi. Pada hakikatnya kinerja Balai TNK akan melahirkan tatanan pengelolaan Pemerintah yang baik dan berkelanjutan. Mengedepankan keutamaan konservasi Komodo beserta ekosistemnya dan pembangunan Pariwisata TNK berbasis ekowisata dengan menjaga kealamiah lingkungan kawasan.

2.4 Tinjauan Taman Nasional Indonesia

Taman Nasional merupakan wilayah perlindungan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada dalam rangka kebutuhan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang Negara. Taman Nasional aset yang berharga harus dijaga dan dikelola semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara fungsi Taman Nasional dijelaskan dalam UU No 5 Tahun 1990 sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dimana dikelola dengan sistem zonasi budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Maksud utama pendirian Taman Nasional di samping untuk konservasi ekosistem alam agar tetap terjaga tetapi disamping itu hal yang paling substansi adalah pemanfaatan Taman Nasional agar berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebuah tujuan ideal yang telah banyak dibahas dinamikanya terkait proses perjalanan pengelolaan Taman Nasional yang ada di dunia (Sayer dan Campbell

2004; Zerner 2000; Lynch dan Harwell 2002).¹² Konsep pengelolaan Taman Nasional ideal dengan tiga fungsi utamanya yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah serta pemanfaatan yang lestari keanekaragaman hayati dan ekosistem. Selain itu pengelolaan Taman Nasional ditata dalam tiga zona, yaitu zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Zona inti dilindungi secara mutlak dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Zona rimba berfungsi sebagai penyangga zona inti dan Zona pemanfaatan merupakan bagian kawasan yang dapat dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Selain itu hal yang terpenting yang di perhatikan Pemerintah soal melibatkan beberapa sektor dalam pembangunan Pariwisata pada Taman Nasional dengan melalui pola *good governance*.

2.5 Tinjauan Kemitraan

Jelas termaktub dalam aturan normatif bahwasannya peran serta elemen Non Pemerintahan di haruskan. Hal tersebut dikarenakan dalam rangka kontribusi terhadap penyelenggaraan kebijakan program kerja oleh lembaga Pemerintahan yang berwenag dalam proses implementasi tatakelola Taman Nasional. Secara dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.19/Menhut-II/2004 Tentang Partisipatif Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada Pasal 4. Kemudian juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional pada Pasal 19 (terkait peran serta masyarakat dalam pembangunan Taman

¹² Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2019, Pukul 23.30
<http://Journal.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jai/Article/Viewfile/3546/2817>

Nasional).¹³ Kemajuan pembangunan Nasional bertumpu pada perkembangan suatu daerah yang dimana ada tiga pilar utama yakni Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Maka dari itu masing-masing mempunyai peran dan fungsi secara proporsional berdasarkan wilayah kewenangan dalam rangka bersama-sama melaksanakan program kerja Balai TNK.

Cikal bakal lahirnya kemitraan berangkat dari hasil Kongres Taman Nasional di Durban Yordania tahun 2003 antara lain menyatakan bahwa setiap entitas kawasan konservasi harus memberikan dampak manfaat yang nyata bagi sosial, ekonomi, politik masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Mitra kerja Balai TNK sendiri diantaranya ada Pemda, BUMN, Swasta, LSM. Lembaga tersebut terlibat aktif dan terkoneksi bersama-sama dalam penjalanan tugas pengembangan konservasi dan pariwisata. Dampak lainnya dengan pariwisata pada TNK membuka peluang lapangan pekerjaan bagi pelaku wisata. Meskipun realitas tersebut dianjurkan untuk mempertimbangkan bahwa konservasi bebas dari aktifitas manusia, akan tetapi pada prinsipnya bahwa semua kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam harus berdampak pada masyarakat.

“Berdasarkan kesepakatan Kongres WCPA (*World Commission on Protected Areas*) di Caracas, Venezuela tahun 1993, pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa hanya dikelola oleh *single institution*, melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat sekitar kawasan”. Sejak awal pembentukannya Taman Nasional diklaim sebagai hak milik negara (*state property*). Sampai dengan hari ini aktor yang mendominasi pengelolaan Taman Nasional adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen

¹³ Ade Febrian, Rangi. Good Governance Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (*Tinjauan Konsep kemitraan Dan Regulasi*) Vol.2, No.1, 2016

Kehutanan melalui Balai Taman Nasional di tingkatan Daerah. Secara otoritas memang mutlak di kelola penuh oleh Pemerintah Pusat tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan sektorlainnya sebagai *suporting sistem* kinerja Pemerintah Pusat.

“Selanjutnya di Indonesia model pengelolaan kawasan konservasi terus berkembang antara lain konsep pembangunan bioregional yang diinisiasi oleh WRI-IUCN-UNEP (Sumardja, Supriatna, Haeruman, 1997)”. Juga pernah penerapkan yang dikenal adanya kemitraan dalam pengelolaan kawasan lindung atau CCA (*Community Conservation Agreements*). Program ini melibatkan LSM lokal sebagai fasilitator. Sayangnya konsep yang ditawarkan lebih bersifat keproyekan sehingga tidak menyentuh permasalahan sebenarnya yang ada. Akan tetapi konsep tersebut berjalan secara maksimal atau kontributif terhadap pengelolaan Taman Nasional. Sehingga proses pengelolaan TNK itu sendiri melibatkan berbagai unsur lembaga Pemerintahan maupun Non Pemerintahan agar pengimplementasian kebijakan dalam wujud program kerja terealisasi secara efektif dan efesien.

Sudah sangat objektif bahwasannya dalam proses pengelolaan Taman Nasional melalui partner kerja secara kemitraan. Sehingga mengharuskan melibatkan multipihak diantaranya Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat merupakan upaya suksesi jalannya proses Pemerintahan. Inisiatif Pemerintah menerapkan pola pengeloaan Taman Nasional bukan tanpa alasan agar dalam manjemen dan kebijakan publik. Terkait ini berjalan sesuai prinsip-prinsip *good govenance* yang dimana setiap unsur lain dalam negara berperan aktif mendukung segala macam kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Apalagi sejak berjalannya

sistem desentralisasi dalam wujud otonomi daerah semakin memperkuat perlu diterapkannya praktek pemerintahan yang partisipatif di jalankan Pemerintah dalam pengimplementasian pengelolaan Taman Nasional Komodo. Ruang demokrasi dalam salah satu prinsip *good governance* yakni partisipatif, berdampak positif pada proses penjalanan pengelolaan taman Nasional Komodo sendiri. Sehingga sektor Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dapat menjadi *suporting sistem* dalam penjalanan implementasi pengelolaan Balai TNK.

Suporting sistem dalam artian sektor Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat wilayah kewenangannya hanya pada unsur pembantu atau penyediaan fasilitas pendukung jalannya pembangunan pariwisata di Taman Nasional Komodo meskipun Pemerintah Pusat yang memiliki otoritas penuh dalam penfgelolaannya. Unsur pembantu dalam hal ini dimana Masyarakat dan Sektor Swasta menyokong pembangunan keamanan dan kelestarian ekosistem dalam kawasan Taman Nasional Komodo pada sektor Insfrastruktur mikro maupun makro diantaranya mako yaitu akses transportasi bandara udara menuju Labuan Bajo, Pelabuhan, Hotel, Restoran, dan mikro yaitu Pendopo, *Souvenir*, Kapal Kayu, dan *Speedboat*.

Secara umum di jelaskan bahwasannya strategi kemitraan merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penetapan dan pengelolaan taman nasional merupakan salah satu cara memperoleh manfaat sumberdaya hutan selain kayu, sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara lestari lintas generasi. Kemitraan secara hakikat bisa kita analogikan sebagai kerjasama dari berbagai pihak baik sifatnya individu maupun

kelembagaan. Kemitraan sering kita kenal serta dijalankan sehari-hari dalam aktifitas masyarakat kita serta membudaya pada kultur bangsa kita yakni Gotong Royong.

“Menurut Notoadmojo (2003) menjelaskan Kemitraan adalah suatu kerjasama secara formal antara individu, kelompok, dan organisasi untuk mencapai suatu tugas atau menjalankan tanggung jawab tertentu.” Secara sederhana kemitraan bisa kita artikan sebagai mitra atau partner kerja. Kalau dibenturkan dengan tatakelola pemerintahan maka setiap institusi Pemerintahan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Maka dalam penjalanan program kerja pada setiap lembaga maka dapat melibatkan berbagai sector baik itu lembaga Pemerintah terkait maupun Non Pemerintahan seperti swasta dan masyarakat. Agar implementasian dari program kerja tersebut dapat lebih efektif dan efisien.

Terdapat tiga prinsip dalam membangun suatu hubungan kemitraan oleh anggota dalam partner kerja diantaranya:

1. Prinsip Kesetaraan (*Equiti*)

Lembaga Balai TNK bersama lembaga Pemerintahan Lainnya sebagai mitra kerja secara kedudukan yang setara dalam hal pengelolaan berdasarkan proporsional kewenangan diantaranya bersama Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan agenda pengamanan, Bumn Telkom dan PLN memfasilitasi infrastruktur komunikasi dalam kawasan TNK, Dinas Pariwisata bersama Balai melaksanakan pemberdayaan masyarakat didalam kawasan.

2. Prinsip Keterbukaan

Segala informasi maupun data Balai di TNK dapat diakses oleh publik, dapat berupa penelitian dan pemagangan oleh lembaga pendidikan dapat memintai data kinerja Balai sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Balai sangat mensupport setiap agenda yang berhubungan dengan penelitian baik dari aspek Pemerintahannya, Satwa, dan Masyarakat yang ada dalam kawasan. Balai sendiri juga melakukan pertanggung jawaban tahunan terhadap Dirlitjen KSDAE Kementerian KLHK. Serta balai juga menjadi sasaran evaluasi dan kontroling oleh lembaga Inspektorat untuk melihat secara langsung aktifitas kelembagaan dan kinerja pengelolaan Balai terhadap kawasan TNK.

3. Prinsip Azaz Manfaat Bersama (*mutual benefit*)

Dengan kebijakan Pemerintah menetapkan TNK sebagai kawasan konservasi dan dijadikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Dengan kebijakan ini sangat berkontribusi positif sekali terhadap pelaku usaha di Kabupaten Manggarai Barat baik itu dari Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat disana. Kawasan TNK dikelola melalui zonasi dan salah satu dari zonasi tersebut ada namanya zona pemanfaatan disinilah dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sektor pariwisata dan penelitian. Sehingga bersumbangsih pada ekonomi pendapatan negara serta masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan penyuluhan satwa Komodo.

2.6 Tinjauan Konservasi dan Kawasan Strategis Pariwisata

2.6.1 Konservasi Taman Nasional Komodo

“Secara historis titik awal konservasi modern di Indonesia dimulai sejak kongres ke 3 Naman Nasional dan kawasan yang dilindungi sedunia pada Oktober 1982 di Bali (Mackinnon et al., 1993). Bersamaan dengan kongres tersebut,

pemerintah Indonesia mendeklarasikan 11 taman nasional (Soemarwoto, 2004)". Wujud nyata pengaturan oleh negara dalam upaya pengelolaan sumberdaya hutan maupun fauna dengan wadah Taman Nasional sebagai dasar hukum. Pada sadarnya pengelolaan kawasan konservasi senantiasa mengacu pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam yang ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada kelestarian dan kealamiah lingkungan dan ekosistem itu sendiri.

"Indonesia telah memiliki pengelolaan kawasan konservasi dan pada tahun 1990 Taman Nasional secara sah ditetapkan sebagai bagian dari sistem kawasan konservasi dilindungi (Rhee et al., 2004 dalam Supriyanto, 2010)". Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan ekosistemnya dan undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan kerangka kerja dasar hukum yang sah bagi pengelolaan taman nasional di Indonesia. Kawasan Konservasi Istilah kawasan dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 juga menjelaskan tentang Penataan Ruang diartikan sebagai wilayah dengan fungsi utama perlindungan atau budidaya.

"Jenis-Jenis Kawasan Konservasi Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh IUCN-The World Conservation Union (MacKinnon, 1993)", ada sepuluh jenis kawasan konservasi yang ada di dunia. Taman Nasional Komodo masuk dalam kualifikasi jenis Taman Nasional yang mana bertujuan untuk melindungi kawasan alami dan berpemandangan indah yang terpenting secara nasional atau internasional serta memiliki nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan, dan rekreasi, TNK juga sebagai Taman Warisan Dunia, bertujuan untuk melindungi bentang alam yang dianggap memiliki nilai universal yang menonjol dan

merupakan daftar pilihan dari kawasan alami dan budaya yang unik di bumi nusantara tercinta .

Di satu sisi pembangunan menghendaki adanya perubahan dan di sisi lain konservasi tidak menghendaki adanya perubahan, karena perubahan dapat menimbulkan kerusakan. Pemahaman tersebut menimbulkan anggapan konservasi sebagai penghambat pembangunan. Padahal tujuan konservasi adalah menunjang pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menggunakan istilah Kawasan Lindung, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Sebagai bagian dari fungsi negara menjadi agen kesejahteraan masyarakat, kepada negara diberikan hak secara konstitusional untuk menguasai sumberdaya alam yang ada di wilayah kekuasaan negara. Pasal 33 ayat 3, UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya alam, dengan tujuan paling akhir pada keberlanjutan produksi, ekosistem dan masyarakat, suatu kawasan dibagi ke dalam peruntukan tertentu yang pada hakikatnya menetapkan wilayah yang sumberdaya alamnya dapat dimanfaatkan.

“Jepson dan Whittaker (2002) dan Wiratno et al. (2001) menjelaskan sejarah dan alasan mengapa pada akhirnya pemerintah sampai pada kebijakan membuat taman nasional”. Selain untuk memenuhi persyaratan konvensi internasional mengenai pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, juga

ada alasan ekonomi dan politik untuk mengontrol sumber daya alam tersebut. Secara khusus, “Jepson dan Whittaker (2002) berpendapat bahwa Taman Nasional dibuat dengan motivasi untuk menjaga suatu kawasan bagi kepentingan ilmiah dan keindahan alam serta tanggung jawab moral untuk menjaga segala bentuk kehidupan yang ada”. Segala aspek pengelolaan harus mengutamakan kebermanfaaaatan bagi seluruh masyarakat. Alam menjadi tumpuhan kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi sehingga sudah menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa menjaga kelestarian alam dan kestabilan ekosistem pada TNK.

Berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 mengarah pada pengelolaan kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia yang berasaskan keserasian dan keseimbangan. Atas dasar prinsip diatas maka dijadikan acuan penyelenggaraan tatakelola seluruh potensi kekayaan alam maupun manusia dalam kawasan TNK oleh Birokrasi Balai dapat terealisasi dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Dalam proses manajemen pengelolaan Taman nasional mengacu pada sasaran strategis Kementrian KLHK yakni:

1. Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Parameter dalam mengukur realisasi sasaran ini pada penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam.
2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran ini dengan peningkatan nilai indeks efektivitas

pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan konservasi satwa Komodo.

Adapun ruang lingkup dari pengelolaan Balai Taman Nasional Komodo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ada tiga ruang lingkup yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kegiatannya dapat berupa :
 - a. Pemberantasan pengebangan liar dan perambahan kawasan.
 - b. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
 - c. Pencegahan kegiatan perburuan.
 - d. Pencegahan berbagai aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kegiatannya dapat berupa :
 - a. Identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di dalam kawasan secara menyeluruh.
 - b. Identifikasi *key features* kawasan.
 - c. Monitoring dinamika *key features* kawasan.
 - d. Monitoring dan evaluasi dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
 - e. Melakukan tindakan konservasi yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya under atau over populasi *key features* flora dan fauna (rehabilitasi, pembinaan habitat, pembinaan populasi, pembangunan koridor dll).
3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (SDAH & E). Kegiatannya dapat berupa :
 - a. Identifikasi, pemanfaatan, dan pengaturan wisata alam secara berkelanjutan.
 - b. Identifikasi, budidaya, dan pemanfaatan plasma nutfah.
 - c. Identifikasi dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada zona-zona tertentu.

- d. Identifikasi, pemanfaatan, dan pengaturan jasa lingkungan.
- e. Media pendidikan, penelitian, bina cinta alam, dan pembinaan generasi muda.

Sasaran dari Rencana Strategis Balai Taman Nasional Komodo Tahun Anggaran 2015-2019 ini mencakup semua kegiatan pengelolaan dan pembangunan Taman Nasional Komodo, antara lain meliputi :

1. Menurunnya tingkat gangguan terhadap kawasan (daratan dan perairan) dan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
2. Meningkatnya upaya pengendalian kebakaran hutan.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat sebagai pelaku konservasi.
4. Termonitornya populasi satwa yang menjadi target prioritas konservasi (komodo dan kakatua kecil jambul kuning).
5. Termonitornya habitat satwa yang menjadi target prioritas konservasi (komodo dan kakatua jambul kuning).
6. Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik wilayah daratan maupun perairan.
7. Optimalnya kunjungan wisatawan baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
8. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan oleh masyarakat agar lestari.
9. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan Taman Nasional Komodo yang efektif, efisien, dan akuntabel.
10. Meningkatnya pelayanan prima baik itu pelayanan internal maupun eksternal.
11. Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan.
12. Meningkatnya kualitas SDM pengelola Taman Nasional Komodo.

Ruang lingkup tugas Taman Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, adalah melaksanakan

pengelolaan ekosistem kawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan fungsi Balai Taman Nasional adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pengelolaan taman nasional.
2. Penyusunan strategi pengelolaan menuju taman nasional mandiri.
3. Pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman nasional.
4. Perlindungan, pengamanan dan penanggulangan kebakaran di Taman Nasional.
5. Promosi dan informasi, bina wisata dan bina cinta alam, serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Mengembangkan konsep pengelolaan taman nasional secara kolaboratif
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kegiatan penelitian pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai Universitas di Indonesia. Antara lain dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), STIPAR Bandung dll. Selain itu Taman Nasional Komodo juga menjadi tempat Praktek Kerja Lapangan bagi siswa-siswa SLTA dari Kabupaten Bima (NTB), Kabupaten Manggarai (NTT) dan Kabupaten Manggarai Barat (NTT). Masih banyak yang harus dan perlu dikaji lagi mengenai potensi alam dari Taman Nasional Komodo seperti pengkajian potensi kawasan ekosistem esensial, dan sosial kemasyarakatan. Kerjasama penelitian yang pernah dilaksanakan antara lain penelitian mengenai hidupan satwa liar komodo beserta habitatnya dan sekarang sedang melakukan kerjasama penelitian dengan Komodo Survival Program (KSP).

Masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Komodo adalah masyarakat dengan kebudayaan yang dibangun dari aspek kelautan dimana laut merupakan sumberdaya alam tempat menggantungkan hidup. Mata pencaharian utama masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Komodo adalah nelayan sehingga interaksi masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Komodo terutama terhadap perairan sangat tinggi. Interaksi positif masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam Taman Nasional Komodo wilayah daratan antara lain pemanenan buah asam dan buah srikaya. Sedangkan interaksi negatif antara lain penebangan pohon untuk keperluan kayu bakar dan perburuan satwa mangsa komodo seperti rusa dan kerbau (lebih sering dilakukan oleh masyarakat dari luar kawasan Taman Nasional Komodo).

2.6.2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Dalam UU Kepariwisataan No. 10 tahun 2009 dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata; wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut “Yoeti (1990) mendefinisikan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dengan suatu maksud tertentu dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu”.

Pariwisata saat ini menjadi sektor yang cukup penting bagi perekonomian nasional. Tahun 2008 perolehan devisa dari sektor pariwisata ini berada di urutan

ke 4 sebagai penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas bumi, kelapa sawit, dan karet olahan. Dengan pertumbuhan pariwisata dunia yang terus meningkat, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia akan semakin meningkat dan akan memberikan kontribusi ekonomi yang semakin besar pula. Selain kontribusi ekonomi, kegiatan pariwisata juga membuka kesempatan kerja baru di daerah tujuan wisata.

Taman Nasional Komodo 2008 ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dan 2011 sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Balai TNK mengemban tugas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas meyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan
2. Perlindungan dan pengamanan kawasan
3. Pengendalian dampak kerusakan sumberdaya alam hayati
4. Pengendalian kebakaran hutan
5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial
6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional didalam kawasan
7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan
8. Evaluasi kesesuaian, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
11. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya

12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan

Kawasan TNK termasuk dalam salah satu kawasan strategis nasional (KSN). Kebijakan regional kawasan TNK tersebut memiliki arah pengelolaan yang mampu memberikan kontribusi terhadap aspek sosial dan pemerataan perekonomian di wilayah sekitarnya. Selain itu KSN juga mengakomodir kepentingan lingkungan hidup yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.

Konsep ekowisata pada awalnya sebagai suatu strategi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Konsep ini kemudian berkembang begitu cepat ke berbagai belahan dunia sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam dan ekosistemnya. Pola hidup *back to nature* telah menjadi gaya hidup dan kebanggaan masyarakat modern saat ini. “Istilah ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh Hector Ceballos- Lascurain pada tahun 1988 (Mitchel, 1998; Furze et al., 1987; Wall et al., 1998)” yang kemudian mendefinisikannya sebagai suatu perjalanan bertanggung jawab ke lingkungan alami yang mendukung konservasi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Ekowisata dinyatakan sebagai sebuah konsep wisata yang mendayagunakan dan mempertahankan kelestarian ekosistem dari lingkungan yang masih alami. Pariwisata berbasis ekowisata adalah metode yang tepat dan relevan dewasa ini di terapkan pada pariwisata dalam Kawasan TNK terkhusus pada zonasi pemanfaatan. “Pariwisata merupakan suatu tempat yang sangat penting dikunjungi dalam suatu perjalanan dengan beberapa bentuk aktual akan keeksotisan

alamiah dan ditentukan berdasarkan geografis wilayah (*Ricardson dan Fluker 2004:48*). Secara hakikat pariwisata memiliki keunikan, kekhasan, orosinalitas, keanekaragaman, kelokalan (*inskeep 1994:12*)”.¹⁴ Selain itu ekowisata bertujuan memadukan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, membuka lapangan kerja baru bagi penduduk setempat, serta memberikan pendidikan kepada pengunjung tentang arti dan manfaat lingkungan. Konsep dan implementasi ekowisata juga tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kawasan konservasi (*protected area*). Jasa ekowisata sebagai metode pendekatan ekonomi yang mengkaji tentang pemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingan banyak pihak untuk mendukung jalannya pembangunan berkelanjutan.

Semenjak tahun 1990 Indonesia baru tercatat dalam pasar wisata global dengan data jumlah kunjungan wisatawan dua juta wisatawan mancanegara.¹⁵ Manajemen salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam tatakelola pariwisata terkhusus pada kawasan strategis. “Manajemen pariwisata dalm rangka mencapai tujuan (*sustainebility*) dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Arah manajemen yang di maksud bagaimana memelihara dan melindungi sumberdaya yang tidak tergantikan (*irreplacable*) agar dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan yang akan datang”.¹⁶ Oleh karena itu dalam proses pengelolaan mengedepankan aspek edukasi pendidikan dan penyadaran agar membangun cara pandang bahwa kelestarian potensi yang ada dalam rangka kemajuan sektor pariwisata merupakan hal yang baik dalam pembangunan

¹⁴ Jurnal Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Good Governance, <https://Jurnal.Ugm.Ac.Id/Jikfkt/Article/Viewfile/582/3030>

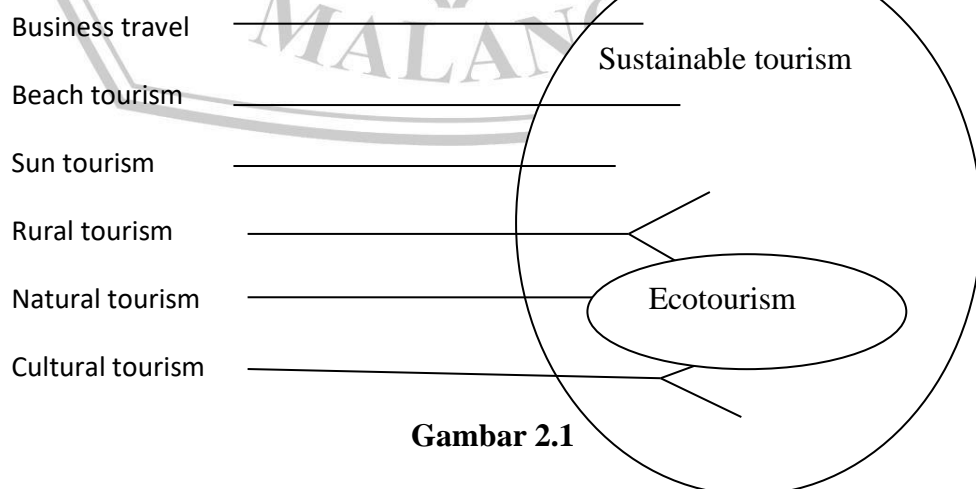
¹⁵ Jurnal Kebijakan Publik Dan Praksis Demokrasi Governance Di Sector Pariwisata

¹⁶ Iwan Nugroho. 2015 , *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjuta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 135

pariwisata berkelanjutan. Hal yang paling mendasar dalam operasional manajemen pariwisata dimana bagian industri pariwisata secara umum menawarkan jasa produksi sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen atau wisatawan. Kepuasan konsumen di tentukan oleh faktor tujuan wisata, produk wisata, promosi, peran produk lokal, dan sistem kebijakan pemerintah.

2.7 Sustainable Development Government

“Menurut *the International Ecotourism Society* atau TIES (1991), menjelaskan ekowisata merupakan perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alam dalam rangka konservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan bagi penduduk lokal”.¹⁷ Ekowisata juga bagian dari pada sustainable tourism. *Sustainable tourism* adalah sektor ekonomi yang lebih luas dari ekowisata yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan wisata secara umum dijelaskan dalam konsep sustainable tourism dan ekowisata Iwan Nugroho dalam Wood, 2000 (Lihat Gambar 2.1).



Gambar 2.1

¹⁷ Ibid, Hlm 15

Berdasarkan deklarasi Quebec di Canada 2002 dan United Nations Commission on sustainable Development 2000 menjelaskan sustainable tourism secara spesifik memuat upaya-upaya¹⁸:

1. Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya
2. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan, dan operasional kegiatan wisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung
4. Menjamin keterlibatan seluruh stakeholder secara efektif dan efisien

Dari konsep diatas maka dapat dianalogikan sebagai gagasan dalam pengimplementasian pengelolaan sumberdaya alam tekhusus Taman Nasional Komodo yang efektif dan efisien dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dalam proses pelaksanaannya harus memiliki manajemen yang profesional, yakni mencakup: Strategi pemasaran yang spesifik, Keterampilan dan pelayanan kepada pengunjung secara intensif, Keterlibatan dan pengembangan kemampuan penduduk lokal, Kebijakan Pemerintah, dan Investasi swasta. Dalam hal ini gol seting pembangunan mengarah pada manajemen sumberdaya manusia dan lingkungan hidup harus bersinergi agar dapat di nikmati berkelanjutan antar generasi. Dengan penerapan kebijakan sistem pariwisata berbasis ekowisata oleh pemerintah hingga hari ini pembangunan dan kelestarian destinasi wisata pada kawasan TNK tetap terjaga kelestarian ekosistemnya. Pada prinsip kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus dapat berkontribusi bagi masyarakat baik pada sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

¹⁸ Ibid, Hlm 16

Hubungan pembangunan lingkungan hidup tidak bisa di pisahkan dengan pembangunan sosial, karena keduanya saling berkesinambungan agar terbangun prinsip keberlangsungan hidup umat manusia. Mengharuskan adanya regulasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang dan terintegrasi antara lingkungan alam, lingkungan binaan dan ataupun sosial. “Berangkat dari kondisi dewasa ini di era reformasi Pemerintahan (*clean enviromental dan good environmental governance* “*transparancy, equity, participation, accountability, empowering and sustainability*) perlunya dukungan sumberdaya manusia maupun *stakeholders* dalam pengelolaan lingkungan hidup”.¹⁹ Pemerintah sebagai fasilitator harus memiliki wewenang membuat kebijakan untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan (penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian) lingkungan hidup.

Dalam perjalanan paradigma pembangunan berkelanjutan terkait persoalan lingkungan dan sosial. Pandangan beberapa pihak diantaranya pembangunan ekonomi (*eco-devolopmentalism*), lingkungan untuk manusia (*eco-humanism*), dan lingkungan untuk lingkungan (*eco-environmentalism*). Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan atau ekonomi, realisasinya terjadi berbagai ketimpangan dimana sangat kurang memperhatikan aspek sosialnya. Pada hakikatnya pengelolaan lingkungan semata-mata memikirkan jangka panjang yakni untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ada lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu:

1. Keadilan antar generasi (*intergeneration equity*)

¹⁹ Jonny Purba, 2005 Pengelolaan Lingkungan Sosial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Hlm 18-21

2. Keadilan dalam satu generasi (*intergenerational equity*)
3. Pencegahan dini (*precautionary principle*)
4. Perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity conservation*)
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif sumberdaya alam (*resource use*)

Konteks Taman Nasional di Indonesia dalam pengelolaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam perjalanan jumlah Taman Nasional yang ditetapkan terus meningkat secara signifikan, tetapi persoalan dalam pengelolaannya juga semakin meningkat. Banyak persoalan Taman Nasional yang sampai saat ini belum terpecahkan seperti: perambahan kawasan, sengketa tata batas, perburuan liar, *illegal logging* dan kurangnya dukungan dari stakeholders lokal. Permasalahan tersebut seringkali berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar Taman Nasional yang rendah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai salah satu tujuan penetapan Taman Nasional ternyata masih sebatas jargon yang jauh dari kenyataan. Besarnya wewenang Pemerintah Pusat atas taman nasional menjadi salah satu pemicu persoalan dalam pengelolaan.

Pemerintah Pusat selalu menganggap permasalahan Taman Nasional sebagai permasalahan teknis, padahal sebenarnya persoalan tersebut memiliki dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Misalnya masalah pencurian hasil hutan di kawasan Taman Nasional. Selama masyarakat setempat masih miskin dan tergantung pada hutan, maka masalah pencurian hasil hutan kayu dan non kayu akan selalu muncul, walaupun puluhan orang telah ditangkap dan dipenjarakan. “Menurut data BPS (2005) jumlah penduduk Indonesia pada tahun

2003 tercatat sebanyak 219,9 juta jiwa. Sekitar 48,8 juta penduduk Indonesia tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan sekitar 10,2 juta jiwa diantaranya tergolong dalam kategori miskin (Wollenberg et al., 2004).” Dapat dianalisis bahwa fenomena masyarakat di kawasan Taman Nasional harus di tangani secara serius oleh Pemerintah dalam hal menangani permasalahan.

Dalam semangat otonomi daerah pelibatan Masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah menjadi penting dalam pengelolaan Taman Nasional. Dikarena dapat meningkatkan efektivitas dan dalam beberapa hal mungkin meningkatkan efisiensi. Kekhawatiran pemerintah pusat akan ketidak mampuan (*capacity*) dan ketidak mauan (*political will*) Pemerintah Daerah dan Masyarakat lokal tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak memberikan sebagian kewenangan untuk berkontribusi dalam pengelolaan Taman Nasional pada aspek ekowisata. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan mungkin akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perlindungan satwa Komodo, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam keterlibatan pelaku wisata.

2.8 Taman Nasional Komodo Berciri Kepulauan

Berdasarkan kondisi geografis kawasan Taman Nasional Komodo bercirikan kepulauan sebab TNK terdiri atas Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau padar, dan 26 Pulau kecil lainnya. Fokus pada penelitian ini terkait konektifitas adalah konektifitas yang direalisasikan baik antar lembaga pemerintahan terkait dalam proses pengelolaan TNK. Selain itu juga koneksi anatar pulau sebagai konservasi fauna Komodo dalam hal informasi dan komunikasi pengelolaan kawasan TNK, sebagai destinasi yang dimanfaatkan sebagai lokasi wisata.

Kondisi habitat Komodo sebagai fauna asli Indonesia sendiri berada di dua pulau secara jumlah yang besar sebagai habitat aslinya yaitu di Pulau Komodo sekitar seribu ekor dan Pulau Rinca seibu lima ratus ekor, selain itu Komodo juga hidup menyebar pada pulau-pulau lainnya dalam kawasan maupun di luar kawasan tetapi jumlahnya hanya sedikit. Kondisi geografis kepulauan yang menjadi tantangan bagi petugas Balai TNK dalam pengelolaan sebab kedua pulau tersebut berbeda pulau dengan kantor Balai sebagai setral administrasi. Jarak antara kantor Balai dengan Kawasan konservasi berjarak sekitar 5 jam perjalanan menggunakan transportasi laut, kemudian antara kedua pulau Komodo dan Rinca tersebut jaraknya pun terbilang jauh di tempuh sekitar sampai 2 jam menggunakan transportasi laut juga.

“Seperti yang dijelaskan bahwasannya sarana transportasi merupakan salah satu aspek pendukung dalam pengelolaan *tourism* tidak hanya sebagai alternatif kelancaran jalannya aktifitas pariwisata juga untuk kepentingan *sustainability* pengelolaan pariwisata”. Selain itu dapat membantu kepuasan pengunjung dalam aktifitas menuju lokasi wisata. Sarana transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk menunjang kelancaran wisata berupa jalan raya, bandar udara, dan pelabuhan laut. Terkait Taman Nasional Komodo akses transportasi yang dapat digunakan untuk menuju lokasi wisata di kawasan Taman Nasional Komodo hanya dapat menggunakan transportasi laut saja. Sedangkan fasilitas transportasi untuk menuju ke kawasan TNK dimana Fasilitas transportasi laut berupa *speedboat* dan kapal kayu pinisi. Fasilitas tersebut yang sebagian besar pihak swasta dan masyarakat setempat berkontribusi pada sektor pariwisata melalui jasa penyewaan. Kontribusi swasta dan masyarakat yang menyediakan

fasilitas penyewaan kapal tersebut mempercepat pengembangan dan pembangunan pariwisata dalam kawasan TNK. Selain itu jasa *home stay* berupa hotel, restoran, agen travel, gait pemandu wisata, dan penjualan sofenir daerah memanjakan para wisatawan pada saat berwisata.

Manajemen konektifitas antar pulau sebagai pusat konservasi komodo harus dijaga komunikasinya. Agar tercapainya manajerial yang efektif dan efesien maka Pemerintah harus menjamin dan menjaga kestabilannya. Baik dalam konteks penjagaan dan pengamanan kestabilan ekosistem Komodo, berupa sumber makanan Komodo dalam kawasan tetap tersedia. Strategi dan taktik Pemerintah harus jelas terealisasi dalam meminimalisir kendala-kendala di lapangan berupa perburuan liar dilakukan pada sumber makanan Komodo berupa kerbau, rusa, babi hutan, dan lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut mengharuskan petugas Pemerintahan terkait baik Balai dan instansi non Pemerintah alinnya yang turut berkontribusi dalam penigkatan pengamanan, personil penjaga, petugas pelayan pariwisata agar berjalan stabil. Sehingga konservasi dan pariwisata berjalan secara berkesinambungan serta mensejahterakan masyarakat.